

Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Gaza: Analisis Peran Strategis pada KTT Global Mesir 2025

Oleh: Dr. Surya Wiranto, SH MH¹

Abstrak

KTT Global mengenai Masa Depan Gaza di Mesir pada 13 Oktober 2025, menandai titik balik signifikan dalam diplomasi Timur Tengah dengan keikutsertaan Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan Asia Tenggara. Naskah akademik ini menganalisis positioning strategis Indonesia dalam arsitektur perdamaian Gaza pasca-konflik melalui metode analisis kebijakan deskriptif. Temuan mengungkap peran ganda Indonesia baik sebagai mediator dalam proses demiliterisasi Gaza maupun sebagai kontributor pasukan perdamaian yang diusulkan dalam dokumen dasar rekonstruksi. Analisis terhadap pidato Presiden Trump yang memuji kapasitas Indonesia mengindikasikan pengakuan internasional terhadap pengaruh diplomasi Jakarta. Simpulan studi menekankan pentingnya sustainabilitas komitmen Indonesia melalui mekanisme trilateral dan kerangka monitoring multilateral untuk memastikan implementasi kesepakatan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Diplomasi Indonesia, Konflik Gaza, KTT Mesir 2025, Demiliterisasi, Pasukan Perdamaian, Arsitektur Keamanan Regional.

1. Konteks Geopolitik dan Lanskap Diplomasi Global Terkini

Penyelenggaraan KTT Global mengenai Masa Depan Gaza yang digelar di Mesir pada pertengahan Oktober 2025 merepresentasikan sebuah perkembangan geopolitik transformatif dalam peta resolusi konflik Timur Tengah, dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah diplomasi kawasan, Indonesia hadir sebagai satu-satunya representasi resmi dari blok negara Asia Tenggara dalam sebuah forum yang dihadiri oleh puluhan pemimpin dunia dari Eropa dan Timur Tengah. Konteks historis pertemuan ini tidak dapat dipisahkan dari momentum pidato visioner Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa pekan sebelumnya yang telah membuka jalan bagi pengakuan internasional terhadap kapasitas diplomasi Indonesia sebagai actor utama dalam isu Palestina, sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma dalam politik global menuju multipolaritas dimana kekuatan menengah seperti Indonesia mulai mengambil peran strategis yang sebelumnya didominasi oleh kekuatan-kekuatan tradisional. Dalam kerangka inilah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Indonesia sebagai "*negara besar dan powerful*" serta memuji kepemimpinan Prabowo

¹ Penulis adalah purnawirawan Laksamana Muda TNI Angkatan Laut, Penasihat *Indo-Pacific Strategic Intelligence* (ISI), Anggota Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia–Australia, Dosen Program Pascasarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Indonesia, Ketua Departemen Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, Sekretaris Jenderal IKAL Strategic Centre (ISC) dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Maritim Indonesia (IIMS). Beliau juga aktif sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator di firma hukum Legal Jangkar Indonesia.

Subianto sebagai "fantastic man and fantastic general" tidak hanya bersifat retorika diplomatik semata, melainkan merupakan indikator nyata dari reposisi strategis Indonesia dalam arsitektur keamanan global, terutama dalam konteks implementasi dokumen dasar rekonstruksi Gaza yang meskipun belum dipublikasikan secara resmi, namun telah ditandatangani oleh para pemimpin kunci termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Pernyataan Trump mengenai pentingnya demiliterisasi Gaza dan pembentukan "*civilian police force*" yang independen juga selaras dengan posisi Indonesia yang selama ini konsisten mendukung solusi dua negara dan penciptaan institusi keamanan Palestina yang legitimate dan professional.

2. Analisis Positioning Strategis Indonesia dalam Dinamika Kawasan

Kehadiran Indonesia dalam KTT Mesir 2025 sebagai satu-satunya negara ASEAN mengundang analisis mendalam mengenai *positioning* strategis Jakarta dalam peta diplomasi konflik Gaza, terutama dalam konteks persaingan pengaruh regional dan kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan modal diplomatik yang dimilikinya. Berbeda dengan Malaysia yang tidak diundang dalam forum tersebut karena dinyatakan hanya memberikan dukungan bersyarat terhadap rencana perdamaian 20 poin dengan *reservation* mengenai *comprehensive solution* yang mencakup hak rakyat Palestina dan isu penjajahan di Tepi Barat, Indonesia justru mendapatkan pengakuan luas melalui puji langsung dari Presiden Trump dan dianggap sebagai mitra strategis dalam proses rekonstruksi Gaza. Fenomena ini mengindikasikan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memposisikan diri sebagai pihak yang mampu menjembatani berbagai kepentingan yang bertikai, sekaligus merefleksikan kegagalan diplomasi Malaysia yang dinilai terlalu rigid dalam menyikapi kompleksitas proses perdamaian. Komitmen Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina sebagaimana diumumkan oleh Prabowo Subianto juga memberikan dimensi baru dalam kontribusi nyata Indonesia terhadap stabilitas kawasan, terlebih dengan adanya pengakuan terhadap kapasitas militer Indonesia yang diwakili oleh latar belakang profesional Prabowo sebagai mantan jenderal yang memahami dinamika keamanan regional. *Positioning* strategis ini semakin menguat dengan adanya realitas bahwa tentara dari negara-negara Islam termasuk Indonesia telah berada di Semenanjung Gaza sebagai bagian dari misi pemantauan, menciptakan faktor *deterrence* terhadap kemungkinan agresi militer Israel di masa depan sekaligus memperkuat posisi tawar Palestina dalam proses demiliterisasi yang menjadi salah satu poin kunci dalam kesepakatan yang ditandatangani dalam KTT tersebut.

3. Analisis Komparatif Respons Negara ASEAN dan Implikasi Regional

Ketidakhadiran Malaysia dalam KTT Mesir 2025 dan reaksi publik Malaysia yang mempertanyakan absennya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam forum strategis tersebut mengungkap dinamika kompleks dalam hubungan intra-ASEAN dan diferensiasi pendekatan diplomatik negara anggota terhadap konflik Palestina. Sementara Indonesia memilih pendekatan *engagement* konstruktif dengan terlibat langsung dalam proses *peacemaking* meskipun harus berkompromi dengan beberapa aspek dalam rencana perdamaian 20 poin, Malaysia justru mengambil posisi idealis dengan menekankan *comprehensive solution* yang mencakup tidak hanya Gaza tetapi juga persoalan pengungsian Palestina dan situasi di Tepi Barat, sebuah pendekatan yang meskipun secara prinsipil konsisten dengan dukungan

tradisional ASEAN terhadap Palestina, namun secara praktis justru mengisolasi Malaysia dari proses perdamaian yang sedang berlangsung. Reaksi masyarakat Malaysia yang menyoroti ketidakhadiran pemimpin mereka dan justru mengapresiasi peran Indonesia sebagaimana tergambar dalam komentar "*Malaysia Heboh! Indonesia Damaikan Palestina Merdeka*" menunjukkan adanya gap persepsi antara kebijakan pemerintah Malaysia dengan ekspektasi publiknya, sekaligus mencerminkan semakin menguatnya *soft power* Indonesia di kawasan. Respons Singapura yang dikabarkan "*terkejut*" dengan kehadiran Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN juga mengindikasikan bahwa *positioning* strategis Indonesia dalam isu Palestina belum sepenuhnya dipahami oleh negara-negara ASEAN lainnya, dan hal ini berpotensi menciptakan *new equilibrium* dalam kepemimpinan regional dimana Indonesia semakin memantapkan diri sebagai *primary actor* dalam diplomasi konflik internasional, sementara negara anggota ASEAN lainnya harus mereevaluasi strategi diplomatik mereka agar tidak tertinggal dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada kepentingan kawasan.

4. Kerangka Solusi dan Model Implementasi Berkelanjutan

Berdasarkan analisis terhadap dinamika KTT Mesir 2025 dan *positioning* strategis Indonesia, diperlukan kerangka solusi komprehensif yang tidak hanya mempertahankan momentum diplomatik yang telah dicapai tetapi juga memastikan sustainabilitas engagement Indonesia dalam proses perdamaian jangka panjang. **Solusi pertama** adalah penguatan kapasitas diplomasi teknis Indonesia melalui pembentukan Satuan Tugas Khusus Implementasi Perdamaian Gaza yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan BAPPENAS untuk memetakan secara detail kontribusi Indonesia dalam rekonstruksi Gaza, demiliterisasi, dan pembentukan *civilian police force* sebagaimana diamanatkan dalam dokumen dasar hasil KTT. **Solusi kedua** adalah pengembangan model *trilateral cooperation* antara Indonesia, Mesir, dan Qatar sebagai *core implementor* proses rekonstruksi, dengan memanfaatkan *comparative advantage* masing-masing pihak dimana Indonesia berkontribusi dalam *capacity building* sektor keamanan dan tata kelola, Mesir sebagai penjamin akses logistik dan koordinasi regional, dan Qatar sebagai penyandang dana utama rekonstruksi infrastruktur. **Solusi ketiga** adalah inisiasi *ASEAN Monitoring Mechanism on Gaza Reconstruction* sebagai wadah konsultasi dan koordinasi dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk memitigasi *potential backlash* akibat kehadiran Indonesia sebagai *sole representative* ASEAN sekaligus menjaga solidaritas regional dengan melibatkan negara anggota lainnya dalam fase implementasi, khususnya dalam hal pengawasan pembangunan infrastruktur sipil, program bantuan kemanusiaan, dan reintegrasi sosial ekonomi masyarakat Gaza pasca-konflik.

5. Rencana Aksi Strategis dan Skema Implementasi Berfasa

Implementasi kerangka solusi memerlukan rencana aksi strategis yang terstruktur dalam tiga fase berurutan dengan milestones yang terukur dan mekanisme evaluasi yang jelas. **Fase pertama** atau **Fase Stabilisasi** (2025-2026) akan memfokuskan pada *deployment* Pasukan Perdamaian Indonesia sebagai bagian dari misi internasional di Gaza, penyusunan peta jalan teknis rekonstruksi oleh Satuan Tugas Khusus, dan pembentukan Sekretariat Bersama Trilateral Indonesia-Mesir-Qatar

yang bermarkas di Kairo sebagai koordinator implementasi. **Fase kedua** atau **Fase Konsolidasi** (2027-2028) akan melibatkan pelaksanaan program *capacity building* untuk *civilian police force* Palestina oleh Indonesia, dimulainya proyek percontohan rekonstruksi infrastruktur kritis seperti sistem air bersih dan listrik dengan pendanaan Qatar, serta aktivasi penuh ASEAN *Monitoring Mechanism* melalui pembentukan kelompok ahli dari negara anggota ASEAN untuk memantau distribusi bantuan dan proses rehabilitasi. **Fase ketiga** atau **Fase Sustainabilitas** (2029-2030) akan difokuskan pada *transfer knowledge* dan *ownership* penuh kepada Otoritas Palestina, evaluasi komprehensif terhadap kontribusi Indonesia, serta penyusunan model replikasi untuk *engagement* diplomatik Indonesia dalam konflik internasional lainnya dengan memanfaatkan *lesson learned* dari proses perdamaian Gaza, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai referensi utama dalam *peacebuilding* dan *state-building* di kawasan konflik.

6. Implikasi Kebijakan dan Penutup

Engagement Indonesia dalam KTT Mesir 2025 dan pengakuan internasional terhadap peran strategis Jakarta membawa implikasi kebijakan yang mendalam baik level domestik, regional, maupun global. Pada level domestik, keberhasilan diplomasi ini berpotensi meningkatkan legitimasi pemerintah di mata publik dan membuka ruang bagi reposisi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih assertive dalam isu-isu global, sementara pada level regional, positioning Indonesia sebagai *sole representative* ASEAN dalam forum strategis Timur Tengah berimplikasi pada perluasan *sphere of influence* Indonesia melampaui batas geografis Asia Tenggara dan potensi transformasi *architecture* keamanan kawasan menuju model *hybrid security governance* yang melibatkan aktor non-tradisional. Pengakuan dari Presiden Trump juga memiliki implikasi terhadap *repositioning* Indonesia dalam geopolitik global sebagai *emerging middle power* yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, sekaligus menjadi katalis bagi peningkatan peran Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB dan OKI. Secara keseluruhan, naskah akademik ini menyimpulkan bahwa partisipasi Indonesia dalam KTT Mesir 2025 bukan hanya sekadar *achievement* diplomatik sesaat, melainkan merupakan titik awal dari transformasi peran Indonesia dalam tata kelola keamanan global, dengan catatan bahwa sustainabilitas pencapaian ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi komitmen, kapasitas menjaga kredibilitas di mata berbagai pihak yang berkepentingan, dan kemampuan mentransformasi *political capital* yang telah diperoleh menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan, tidak hanya di Gaza tetapi juga dalam konteks resolusi konflik yang lebih luas di tingkat global.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Laporan KTT Global mengenai Masa Depan Gaza*. Jakarta: Kemlu RI.
2. Trump, D. (2025). *Pidato dalam KTT Global mengenai Masa Depan Gaza*. Mesir: Sekretariat KTT.
3. Subianto, P. (2025). *Pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Palestina*. New York: PBB.

4. Institute for Palestine Studies. (2025). *Dokumen Rencana Perdamaian 20 Poin*. Ramallah: IPS.
5. ASEAN Secretariat. (2025). *ASEAN Position on the Gaza Conflict*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
6. Anwar, I. (2025). *Pernyataan Pers mengenai Kebijakan Malaysia Terhadap Palestina*. Kuala Lumpur: Kantor Perdana Menteri Malaysia.
7. Al-Sisi, A.F. (2025). *Keterangan Pers Usai KTT Global Mesir*. Kairo: Kepresidenan Mesir.
8. Erdogan, R.T. (2025). *Wawancara Eksklusif tentang Peran Turki dalam Perdamaian Gaza*. Istanbul: Kantor Kepresidenan Turki.